

ProKlim: Institutional Data Inventory Assistance at Site Level

ProKlim: Pendampingan Inventarisasi Data Kelembagaan Di Tingkat Tapak

Khuriyatul husna¹, Alexander Yandra^{*2}, Dian Rianita³, Adia Ferizko⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning

*e-mail: khuriyatulhusna@unilak.ac.id¹, alexsy@unilak.ac.id^{*2}, dianrianita@unilak.ac.id³, adiaferizko@unilak.ac.id⁴

Abstract

The Climate Village Program (ProKlim) is a national movement for community-based climate change control and aims to build a climate-resilient society. The determination of the area to be ProKlim is determined by the results of the assessment of the National Registry System for Climate Change Control (SRN PPI). The recorded areas make it easier for the Government to collect data regarding the addition of regions that are contributors in the Nationally Determined Contribution (NDC). Various benefits can be achieved by regions and communities that are included in the SRN and are nominated. But unfortunately many regions and communities do not know and understand what ProKlim is and its benefits are recorded in the PPI SRN. Therefore, education and assistance activities related to the data inventory needed in the SRN PPI are important to do. The method of implementing service activities is carried out in the form of education related to ProKlim and SRN PPI, Focus Group Discussions (FGD) and assistance in inventorying institutional data. The institutional aspect is the main concern of the service team because it has a weight of 40 percent of the assessment. So that institutional strengthening in terms of knowledge and assistance for managers of various ProKlim activities is very much needed. The success of climate change conservation and control cannot be separated from the collaboration of various parties, especially universities

Keywords: climate change; capacity building; institutional; collaboration; Proklim

Abstrak

Program kampung iklim (ProKlim) merupakan gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas masyarakat dan bertujuan membentuk masyarakat berketahtaan iklim. Penetapan daerah menjadi ProKlim ditentukan oleh hasil penilaian Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Wilayah yang terdata memudahkan Pemerintah dalam melakukan pendataan terkait penambahan daerah yang menjadi kontributor dalam Nationally Determined Contribution (NDC) . Berbagai keuntungan dapat diraih oleh wilayah dan komunitas yang masuk SRN dan mendapat nominasi. Namun sayangnya banyak wilayah dan komunitas masyarakat yang belum mengetahui dan memahami apa itu ProKlim dan keuntungannya terdata dalam SRN PPI. Oleh sebab itu, kegiatan edukasi dan pendampingan terkait inventarisasi data yang diperlukan dalam SRN PPI penting untuk dilakukan. Metode penerapan kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam bentuk edukasi terkait ProKlim dan SRN PPI, Focus Group Discussion (FGD) dan pendampingan dalam inventarisasi data kelembagaan. Aspek kelembagaan menjadi perhatian utama tim pengabdian dikarenakan memiliki bobot 40 persen dari penilaian. Sehingga penguatan kelembagaan dari sisi pengetahuan dan pendampingan pengelola berbagai aktifitas ProKlim sangat diperlukan. Keberhasilan pelestarian dan pengendalian perubahan iklim tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak terutama perguruan tinggi.

Kata kunci: Perubahan iklim; peningkatan kapasitas; kelembagaan; kolaborasi; proklim

1. PENDAHULUAN

Program kampung iklim (ProKlim) merupakan gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas masyarakat dan bertujuan membentuk masyarakat berketahtaan iklim. Program ini dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. ProKlim menjadi salah satu modal dasar pencapaian penurunan emisi di Indonesia (Perdinan, 2020; Faedulloh, Irawan dan Prasetyanti, 2019). Selain itu perubahan cuaca atau iklim yang ekstrim dapat menimbulkan

berbagai macam penyakit seperti, flu, batuk, diare, demam berdarah, dan lainnya (Jannah dkk, 2022). Kegiatan ProKlim terdiri dari adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (Mashur & Meiwanda, 2019). Upaya mitigasi dan adaptasi diperlukan Kerjasama semua pihak untuk berkontribusi dalam menurunkan gas emisi rumah kaca (Legionosuko, 2019; Madjid, Asmoro dan Samudro , 2019). Peningkatan kesadaran di tingkat lokal diperlukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan komunitas melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi (Dewi, Maryono dan Warsito, 2019).

Landasan kebijakan ProKlim adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, dan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim. Secara umum, program nasional ProKlim belum dikenal jauh dikalangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data lokasi ProKliM Propinsi Riau tahun 2021(KLHK, 2021), ada 11 titik wilayah di Propinsi Riau yang telah melaksanakan ProKlim dan masuk dalam nominasi ProKlim Utama dan Lestari. Keberadaan dari 11 titik wilayah yang melaksanakan ProKlim, masih sangat kecil bila dibandingkan dengan target KLHK mewujudkan dua puluh ribu kampung iklim di tahun 2024.

ProKlim merupakan Program strategis yang bisa menjadi solusi permasalahan lingkungan di Provinsi Riau. Banyak wilayah telah melaksanakan kegiatan untuk menanggulangi perubahan iklim. Namun sayangnya kegiatan tersebut belum didaftarkan dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Padahal SRN menjadi salah satu dasar penetapan ProKlim. Pesantren sebagai salah satu komunitas masyarakat memiliki berbagai kegiatan Pendidikan yang dapat diindikasikan sebagai kegiatan ProKlim. Termasuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Pesantren Ibnu Al Mubarok. Dari sisi Kegiatan yang dilaksanakan di Pesantren Ibnu Al Mubarok mengindikasikan kegiatan yang dapat mengurangi gas emisi rumah kaca dan dapat dikategorikan sebagai kegiatan ProKlim seperti pembuatan pupuk cair, penghijauan, bank sampah dan lain sebagainya termasuk melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik (Latifa dkk, 2022). Namun kegiatan yang dilakukan belum terdata dalam SRN. Agar berbagai kegiatan yang ada di Pesantren Ibnu Al Mubarok terdaftar dan berkelanjutan maka perlu pendampingan dalam melakukan inventarisasi data kegiatan serta penguatan dari sisi kapasitas kelembagaan.

Keberadaan komunitas masyarakat seperti pesantren memerlukan pendampingan dan peningkatan kapasitas diri dan kelembagaan, untuk mendukung tercapainya target *Nationally Determined Contribution* (NDC). Pesantren Ibnu Al Mubarok , dalam pengelolaan data kegiatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta penguatannya belum berjalan dengan baik. Hal ini di lihat dari berbagai aktifitas ProKlim di pesantren belum terdokumentasi baik struktur organisasinya maupun kegiatan yang telah dilakukan. Penilaian kelembagaan mendapat bobot 40 persen dan menjadi poin yang sangat penting dalam mendukung Pesantren masuk dalam nominasi ProKlim. Terdatanya Pesantren Ibnu Al Mubarok di SRN akan memudahkan Pemerintah dalam melakukan pendataan terkait penambahan daerah yang menjadi contributor dalam NDC. Berbagai keuntungan dapat diraih oleh wilayah yang masuk SRN dan mendapat nominasi. Bantuan baik materil dan non materil diharapkan dapat mengalir dan memberikan keuntungan bagi wilayah yang masuk dalam nominasi.

Banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program kampung iklim (Sudarwanto et al., 2021), misalnya masyarakat cenderung hanya mau terlibat bilamana mereka mendapatkan keuntungan langsung (Krisnawansyah et al., 2018). Selain itu ada budaya masyarakat, norma, sikap gotong royong, faktor kepemimpinan di tingkat lokal, dan keseriusan pemimpin menjadi penggerak masyarakat (Mardika et al., 2018).

Pesantren Ibnu Al Mubarok sebagai salah satu institusi Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak bangsa. Pesantren diarahkan untuk dapat memberikan pembelajaran yang dapat menambah kompetensi dan kapasitas dari siswa sehingga menjadi bekal bagi siswa kedepannya. Apabila Pesantren Ibnu Al Mubarok masuk ke dalam proklim,

secara internal dapat memperkuat dan meningkatkan kegiatan yang telah dilakukan. Secara eksternal, reputasi pesantren sebagai salah satu kampung iklim akan menjadi daya Tarik di masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, reputasi yang diperoleh dapat meningkatkan jumlah siswa yang masuk pesantren. Secara kualitatif meningkatkan mutu dari siswa dan pesantren sebagai institusi. Dan tentunya pencapaian yang diperoleh oleh pesantren dapat dimanfaatkan untuk warga sekitar lingkungan pesantren Al Mubarok.

Dari berbagai analisis situasi yang ada, adapun permasalahan kelompok mitra adalah: Mitra belum memiliki komunitas-komunitas kelembagaan untuk menguatkan serta melaksanakan berbagai kegiatan dengan menyimpan bukti kegiatan secara sistematis. Sehingga banyak data kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik. Tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk melakukan inventarisasi data aksi iklim dalam SRN PPI khususnya pada aspek kelembagaan. Pengetahuan dan pengalaman menjadi acuan bentuk persepsi pribadi ataupun partisipasi kelompok menjadi kunci keberlanjutan kegiatan lingkungan (Ritohardoyo & Ardi, 2014). Oleh sebab itu, kehadiran kita sebagai akademisi mutlak diperlukan untuk mendampingi Pesantren dalam mengelola segala kegiatan dalam aspek kelembagaan.

2. METODE

Kegiatan ini telah dimulai dengan melakukan observasi, pendampingan dan penelitian dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di lapangan. Dari hasil kegiatan menemukan bahwa mitra masih membutuhkan pelatihan dan pendampingan dalam bentuk kegiatan pengabdian.

Tabel 1. Para Pihak dan Metode Kegiatan Pengabdian

Persoalan Mitra	Pihak Yang Akan Terlibat	Penerapan	Metode Pelaksanaan
Tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk melakukan inventarisasi data aksi iklim dalam SRN PPI pada aspek kelembagaan	FIA Unilak, PHR, Pondok Pesantren Ibnu Al Mubarok, KLHK, DLHK	Sosialisasi, Pelatihan dan Pendampingan	FGD (daring dan luring), Sensus Lapangan, Wawancara
Kelembagaan belum teradministrasikan	FIA Unilak, Pondok Pesantren Ibnu Al Mubarok	Mengadministrasikan kelembagaan pesantren dan komunitas lainnya	FGD dan Asistensi

Adapun tahapan dalam kegiatan pengabdian serta kegiatan yang dilakukan sebagai berikut.

Tabel 2. Tahapan dan kegiatan pengabdian

Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan					
	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt
Soialisasi dan Penguatan kapasitas SDM pendamping mitra	X					
FGD pendamping dengan mitra dan para pihak untuk persiapan kegiatan		X				
Pendampingan dalam Inventarisasi data SRN PPI pada aspek kelembagaan			X			
Pendaftaran Proklam				X		
Luaran Kegiatan					X	
Laporan hasil kegiatan						X

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan ProKlim mengedepankan aspek keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahap pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan pada lokasi kampung iklim. Melalui pendekatan ini komitmen dan motivasi masyarakat akan meningkat, serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap program/kegiatan yang berjalan. Mempertimbangkan pentingnya hal tersebut, maka komponen kelembagaan dan dukungan keberlanjutan seperti yang diuraikan dalam gambar 7 dibawah ini mempunyai bobot 40% dari total penilaian pada saat dilakukan evaluasi pengusulan ProKlim.

ProKlim dapat menjadi solusi dan sukses apabila program ProKlim dilakukan secara bersama dengan melibatkan semua pihak, baik Pemerintah, *Privat* dan *Civil society*. Unsur Perguruan tinggi, pemerintah dan swasta diimbau untuk berkolaborasi dalam pelestarian lingkungan dan mengendalikan dampak perubahan iklim menjadi hal penting untuk dilakukan (Yandra, Wardi dan Husna, 2021; Afni et al., 2019). Oleh sebab itu, Tim Pengabdian dari Perguruan tinggi dituntut untuk melaksanakan kegiatan pengabdian dengan berbagai bentuk sebagai upaya mendukung pelestarian lingkungan dan pengendalian perubahan iklim.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait pembentukan kelembagaan Proklim di Pesantren Ibnu Al Mubarok dilakukan berdasarkan hasil observasi, pendampingan dan penelitian dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan Pesantren dalam mengelola kegiatan kegiatan yang menunjang terwujudnya Proklim. Pesantren belum memiliki komunitas-komunitas kelembagaan untuk menguatkan serta melaksanakan berbagai kegiatan dengan menyimpan bukti kegiatan secara sistematis. Sehingga banyak data kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik. Pihak Pesantren tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk melakukan inventarisasi data aksi iklim dalam SRN PPI khususnya pada aspek kelembagaan. Sehingga Tim melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan pihak Pesantren sebagai mitra agar dapat mengelola kegiatan kegiatan yang ada terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Kegiatan Pengabdian di Pesantren Ibnu AL Mubarok dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan seperti sosialisasi apa itu Proklim, koordinasi dengan berbagai stakeholder, melakukan pemilihan enumerator untuk mendampingi pesantren dalam inventarisasi data kelembagaan, Focus Group Discussion dengan pihak Pesantren, Pengisian data di SRN PPN terkait data kelembagaan serta membantu dalam mendokumentasikan berbagai kegiatan di Pesantren sebagai bentuk evidence dalam pengisian di SRN.

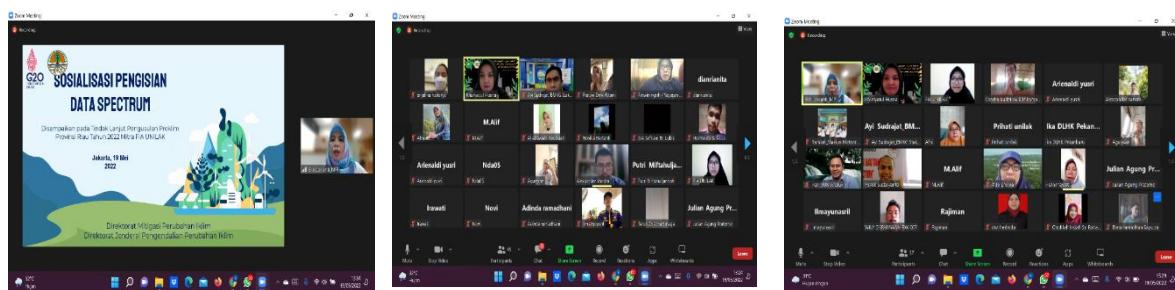
Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Tim yaitu :

1. Pada tanggal 18 Maret 2022 dilakukan sosialisasi terkait Proklim dan pengenalan SRN PPI yang dijadikan sebagai tempat pengisian data dalam pengajuan tempat sebagai lokasi Proklim



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi pengenalan ProKlim dan pengisian SRN PPI ke Mitra oleh Ditjen PPI KLHK

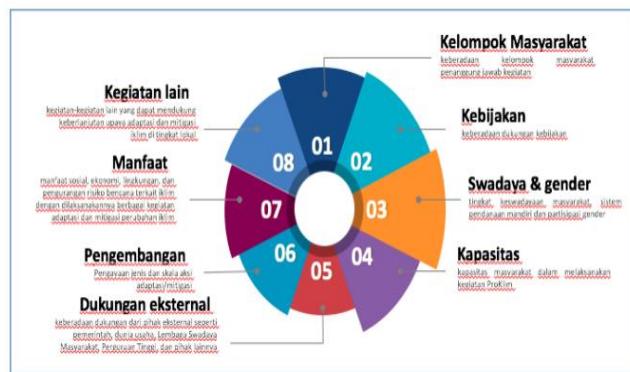
2. Tim pengabdian melakukan kegiatan sosialisasi pengisian Spectrum pada tanggal 19 Mei 2022 yang dilakukan secara daring dan luring oleh Ditjen Pengendalian dan Perubahan Iklim (DitjenPPI), BMKG, serta dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru guna memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang terlibat termasuk Pesantren dalam kegiatan ProKlim lebih memahami program ini.



Gambar 2. Sosialisasi Pengisian data SPEKTRUM

Setelah dilakukan kegiatan sosialisasi, Tim Pengabdian melakukan pendampingan dalam penguatan kelembagaan dengan mengumpulkan dokumen dokumentasi terkait aspek kelembagaan untuk data dalam pengisian SRN PPI. Tim melakukan dan mendampingi pihak Pesantren dalam mengisi data di SRN PPI terkait data kelembagaan dan data lainnya seperti mitigasi dan adaptasi serta spectrum. Tim Pengabdian juga terus melakukan pemantauan terhadap pengisian dan penginputan data sampai semua data yang ada terdokumentasi dan terupload di sistem SRN PPI. Dalam proses pengisian, Tim melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti DLHK Kota Pekanbaru serta pihak BMKG dan PPI dalam mengawasi data yang terupload di SRN PPI.

Kegiatan inventarisasi data ProKlim pada aspek kelembagaan, dilakukan berdasarkan data isian pada SRN PPI. Pengisian data harus memperhatikan keberlanjutan dan dukungan kelembagaan.



Gambar 3. Keberlanjutan dan dukungan kelembagaan Proklim

Sumber : Roadmap Proklim (2017)

Aspek yang harus ada, dibentuk dan diisi yang dilengkapi dengan “evidence” pesantren Ibnu Al Mubarok sebagai calon proklim pada aspek kelembagaan (SRN, 2022) yaitu :

1. Kelembagaan Masyarakat

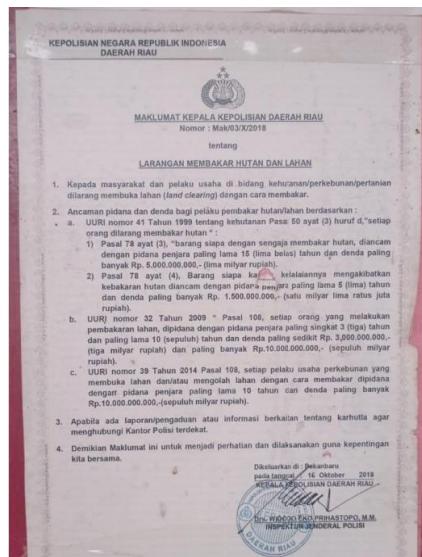
Aspek kelembagaan masyarakat menjelaskan tentang identitas Lembaga, struktur organisasi, program kerja, aturan dan sistem kaderisasi. Eksistensi pesantren sebagai Lembaga Pendidikan serta aktifitas kegiatan proklim yang dilakukan harus didukung secara tertulis. Kehadiran pengurus lembaga untuk menjalankan pesantren sangat

diperlukan untuk melaksanakan berbagai aktifitas kegiatan proklim. Sejauh data yang diinventarisasi, pesantren sebagai Lembaga telah memenuhi kriteria tersebut.

Struktur organisasi telah terbentuk dan memiliki aturan organisasi dengan sistem kaderisasi yang berjalan dengan baik. Namun struktur organisasi yang ada belum tersedia program kerja secara tertulis terkait aktifitas yang dilakukan di pesantren. Kegiatan yang berkaitan dengan proklim seharusnya dikelola dengan baik dengan adanya penunjukan terhadap orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Namun kegiatan yang berlangsung serta orang yang ditunjuk tidak dilakukan secara tertulis dan masuk ke dalam struktur organisasi.

2. Dukungan Kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim

Kebijakan yang dibuat di pesantren dalam melaksanakan berbagai aktifitas harus melindungi kegiatan proklim. Seperti perlindungan terhadap tanaman penyimpan air, adanya kebijakan larangan menebang pohon produktif serta kebijakan tersebut dibuat secara tertulis. Termasuk kebijakan pemerintah local yang mengatur pelarangan serta perlindungan untuk kegiatan Proklim. Contohnya kebijakan larangan membakar hutan dan lahan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Riau nomor :Mak/03/X/2018



Gambar 4. kebijakan Pemerintah Lokal dalam hal larangan membakar hutan dan lahan

3. Partisipasi masyarakat

Masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahap pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan pada lokasi kampung iklim. Melalui pendekatan ini komitmen dan motivasi masyarakat akan meningkat, serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap program/kegiatan yang berjalan. Keterlibatan masyarakat diwujudkan dalam bentuk sumbangan dan swadaya masyarakat dalam kegiatan proklim. Adanya bank sampah, dana dari Yayasan serta kegiatan gotong royong dan Kerjasama yang dilakukan pada berbagai aktifitas proklim di Pesantren menandai bahwa partisipasi masyarakat itu ada.



Gambar 5. Kegiatan gotong royong di Pesantren

4. Kapasitas masyarakat

Adanya kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ke pihak lain yang diperankan oleh tokoh dan pemimpin pesantren serta penggunaan berbagai macam teknologi dalam kegiatan proklim. Seperti pembuatan pupuk organic, cara mengukur curah hujan yang diberikan oleh seorang narasumber local.



Gambar 6. Contoh kegiatan pembuatan pupuk cair organik

5. Dukungan sumber daya eksternal

Kegiatan pelaksanaan proklim mendapat dukungan dari pemerintahan baik local hingga pusat, dukungan dari sector privat, NGO dan perguruan tinggi. Sejauh ini, proklim yang ada di pesantren telah melibatkan berbagai pihak termasuk FIA Unilak.

6. Pengembangan kegiatan

Aktifitas pengembangan kegiatan berkaitan dengan konsistensi aktifitas proklim yang telah dilaksanakan oleh Pesantren. Konsistensi erat kaitannya dengan keberlanjutan program. Semakin lama aktifitas proklim dilakukan akan semakin baik. Pesantren sendiri telah melakukan pengelolaan kegiatan proklim lebih dari 1 tahun. Sedangkan dalam SRN PPI keberlanjutan serta konsistensi program paling tidak telah berlangsung selama dua tahun lebih. Di sini, pesantren harus dan tetap semangat melanjutkan aktifitas yang telah berjalan.

7. Pengelolaan data aksi

Setiap aktifitas yang dilakukan dalam mewujudkan Proklim sebaiknya tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Kegiatan ini dapat dilakukan secara manual maupun terkomputerisasi. Sebaiknya dalam pengelolaan data aksi, pesantren menunjuk personil yang bertanggung jawab atas data aksi. Kemudahan teknologi dan era digital saat ini justru dapat mempermudah segala aktifitas mencatat dan mendokumentasikan setiap kegiatan.

8. Manfaat terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan

Aktifitas yang mendukung Proklim jika dikelola dengan baik, konsisten dan berkelanjutan akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi warga pesantren dan masyarakat sekitar. Penghijauan yang dilakukan dapat memberikan keteduhan di area pesantren. Penggunaan pupuk organic untuk tanaman sayur bermanfaat mengurangi zat kimia yang dikonsumsi oleh tubuh. Sehingga warga pesantren menjadi lebih sehat. Keberlanjutan program akan berdampak luas bagi masyarakat sekitar untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan Proklim.

Proses evaluasi sosialisasi pengenalan ProKlim dan SRN PPI serta pendampingan dalam melakukan inventarisasi data kelembagaan telah dilaksanakan dengan capaian skor 22.92 dari nilai maksimal 40. Untuk perolehan awal pengajuan pesantren sebagai calon ProKlim dengan capaian skor tersebut belum memenuhi apa yang diharapkan dikarenakan banyak data yang belum terpenuhi. Hasil pengisian data kelembagaan pada SRN PPI menandakan bahwa pengetahuan Pengelola pesantren telah memahami data apa saja yang diperlukan. Sehingga yang diperlukan adalah sebuah keberlanjutan kegiatan yang ada dan harapannya di tahun berikut dapat meningkatkan skor kelembagaan pada SRN PPI.

Kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ProKlim tidak hanya kelembagaan tingkat tapak seperti pesantren Ibnu Al Mubarok, namun juga kelembagaan yang terdapat di tingkat kabupaten/kota/provinsi (Dinas Lingkungan Hidup) hingga Pemerintah (KLHK) termasuk unit pelaksana teknis yang secara langsung bertanggungjawab dalam ProKlim. Hal lain yang menjadi penilaian terkait aspek dukungan keberlanjutan misalnya seperti tingkat keswadayaan masyarakat, kemampuan untuk membangun jejaring kerja dengan pihak eksternal yang dapat mendukung keberlanjutan program, dan penerapan nilai-nilai tradisional yang mendukung upaya adaptasi/mitigasi perubahan iklim.

4. KESIMPULAN

Masyarakat maupun komunitas hendaknya lebih memperhatikan aspek administrasi dan kelengkapan kegiatan berupa dokumen dan catatan yang berhubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kampung iklim. Hal ini dikarenakan aspek administrasi memegang poin besar yaitu 40 persen dalam data kelembagaan. Kegiatan pendampingan inventarisasi data serta penguatan kelembagaan mutlak diperlukan sebagai upaya meningkatkan kapasitas SDM komunitas. Peningkatan kapasitas SDM dimanfaatkan dalam mengelola informasi iklim untuk langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penguatan SDM dan kelembagaan dilakukan sebagai upaya membantu pemerintah membentuk 20.000 kampung iklim di tahun 2024 guna terwujudnya masyarakat berketahanan iklim di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas Kerjasama yang dilakukan antara FIA UNILAK, PHR, KLHK beserta mitra para *stakeholder* yang mendukung Program Kampung Iklim.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, Suryadi, S., Azis, Y. M. A., & Purwanto, B. H. (2019). The Role Of Transglobal Leadership For Forest And Land Fire Control In Riau Province. *International Journal Of Innovation, Creativity And Change*, 9(5), 364–387.
Https://Www.Ijicc.Net/Images/Vol9iss5/9513_Afni_2019_E_R.Pdf
- Dewi, A. E., Maryono, M., & Warsito, B. (2019). Implementasi Program Kampung Iklim Di Kota

- Surakarta. In *Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Environmental, and Learning* (Vol. 16, No. 1, pp. 221-228).
- Faedlulloh, D., Irawan, B., & Prasetyanti, R. (2019). Program Unggulan Kampung Iklim (ProKlim) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1). <Https://Doi.Org/10.26905/Pjiap.V4i1.2364>
- Jannah, F., RZ, I. O., & Yandra, A. (2022). Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (Toga) Di Kampung Iklim Rw 03 Kelurahan Tabek Gadang. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(5), 1232-1237.
- KLHK. (2021). *Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim, Pengelolaan Data Dan Informasi Aksi Dan Sumber Daya Untuk Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim Indonesia*. <Http://Srn.Menlhk.Go.Id/>. <Http://Srn.Menlhk.Go.Id/Index.Php?R=Home%2Findex>
- Krisnawansyah, Y., Ediana, D., Fatma, F., Yuniliza, Y., Ekawandani, N., Faujiah, F., Rum, A. I., Mesin, T., Bandung, P. T., Darusmanl, H. Y., Mumu, H., Hamdan, A., Hugo Aries Suprapto, Muhammad Rusdi, P., Berdasarkan, S., No, U. U., Dpr, K., Ri, M. P. R., Gatot, J., Senayan, S., ... Tunggadewi, U. T. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle Di Kabupaten Solok. *Thesis*, 1(2).
- Legionosuko, T., Madjid, M. A., Asmoro, N., & Samudro, E. G. (2019). Posisi Dan Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Guna Mendukung Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3). <Https://Doi.Org/10.22146/Jkn.50907>
- Mardika, P. A., Sarwadi, A., & Pramono, R. W. D. (2018). Community Empowerment In Serut Village On Climate Change Adaptation And Mitigation. *Jurnal Teknosains*, 6(2). <Https://Doi.Org/10.22146/Teknosains.37167>
- Mashur, D., & Meiwanda, G. (2019). Adaptation And Mitigation Of Climate Change Based On Community Empowerment. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1). <https://doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.25-32>
- Perdinan, P. (2020). Perubahan Iklim Dan Demokrasi: Ketersediaan Dan Akses Informasi Iklim, Peranan Pemerintah, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Implementasi Adaptasi Perubahan Iklim Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.87>
- Ritohardoyo, S., & Ardi, G. B. (2014). Arahan Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove: Kasus Pesisir Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. *Geografi*, 11, 43–57.
- Siswati, L., Eterudin, H., Setiawan, D., Ratnaningsih, A. T., & Yandra, A. (2022). Penyadaran Kepada Ibu Rumah Tangga dalam Pemisahan Sampah Organik dan Anorganik Rumah Tangga di Kecamatan Minas. *Diklat Review: Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan*, 6(1), 94-101.
- Sudarwanto, S., Tjoneng, A., & Suryanti, S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) Di Desa Poleonro Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. *AGROTEK: Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian*, 4(2), 52–64. <https://doi.org/10.33096/agrotek.v4i2.132>
- Yandra, A., Husna, K., & Wardi, J. (2021). Assistance in the administration system of the Pelangi Waste Bank, Siak Regency. *Community Empowerment*, 6(8), 1395-1402.